

Bugis dan Islam

Persebaran Darud Dakwah wal' Irsyad (DDI) di Indonesia

Andi Faisal Bakti*

Abstract: The development of Islamic Institution in South Sulawesi begins from Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) in Sengkang until becomes Darud Dakwah wal' Irsyad (DDI) is not far from an important role of civil society such as government, public figure, internal and external organization, and entrepreneur. Besides, it also involves certain person like AGHM As'ad and AGH Abdul Rahman Ambo Dalle.

Kata Kunci: Madrasah Arabiyah Islamiyah, Darud Dakwah wal' Irsyad, AGHM As'ad, AGH Abdul Rahman Ambo Dalle, Sengkang, dan Mangkoso.

PROSES Islamisasi di daerah Sulawesi Selatan berlangsung sejak awal ke-17, ketika raja Gowa pertama kali memeluk Islam. Pendidikan keislaman pada periode awal berpusat di istana-istana Makassar dan Bugis. Pada perkembangan selanjutnya, mesjid bukan hanya tempat shalat berjamaah, tetapi juga sebagai tempat proses belajar mengajar tentang keislaman. Ini terutama ketika pengikut Islam sudah semakin berkembang karena rakyat seca-

*Penulis adalah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Research Fellow pada International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden/Amsterdam, Belanda. Substansi paper ini dipresentasikan pada *The International workshop on Bugis Diaspora and the Dissemination Muslim Authority in the 20th Century Malay-Indonesian Archipelago*, dilaksanakan oleh IIAS bekerjasama dengan IAIN Alauddin, Makassar, dan partisipasi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada 5-8 Juni 2003.

ra umum mengikuti rajanya. Proses pendidikan di istana dan mesjid ini berlangsung hingga awal abad ke-20, ketika madrasah dibangun di berbagai tempat di Sulawesi Selatan. Di Sengkang, Kabupaten Wajo telah berdiri Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI). Madrasah atau sekolah agama atau Arab seperti ini tidak hanya berdiri dengan nama lain (seperti Darud Dakwah wal' Irsyad atau (DDI) di tempat lain di wilayah Sulawesi, tetapi mencakup seluruh Nusantara. Proses perkembangannya ditopang berbagai unsur masyarakat sipil (*Civil Society*), seperti unsur pemerintah (penguasa, raja, negara atau *state*), pengusaha (*market*), lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat (*public*), serta pribadi-pribadi (*private*) tertentu yang dianggap berpengaruh di suatu tempat. Pembukaan madrasah-madrasah ini seiring dengan banyaknya orang-orang Sulawesi Selatan yang merantau ke daerah lain di Nusantara yang pada gilirannya tetap tertarik untuk memperdalam pengetahuannya tentang keislaman dari tanah leluhurnya. Banyak putra-putra mereka yang dikirim orang tuanya untuk menuntut ilmu keislaman di Sengkang dan madrasah-madrasah lain di Sulawesi Selatan. Santri-santri ini, ketika kembali ke daerahnya dibolehkan membangun cabang DDI.

Sejarah Perkembangan DDI

Di Sulawesi Selatan terdapat lembaga pendidikan (pondok pesantren) yang tertua dan terkenal di masyarakat yang telah menghasilkan ulama-ulama ter-

kemuka. Pondok pesantren tersebut adalah Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang, Wajo yang didirikan pada Mei 1930 oleh Anre Gurutta (AG)¹ HM As'ad (selanjutnya ditulis M. As'ad).² M As'ad mendirikan MAI setelah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah al-Falah, Mekkah pada 1928.³ Mulanya, MAI Sengkang, Wajo hanyalah pengajian pondok dengan sistem *halaqah* yang diadakan di rumah M. As'ad sendiri serta di Mesjid Jami Sengkang.⁴ Pengajian ini semakin berkembang dan santrinya semakin banyak sehingga sistem *halaqah* tidak cocok lagi. Menyadari hal itu, maka dibukalah madrasah dengan menempati gedung sekolah yang terletak di samping Mesjid Jami Sengkang dengan sarana yang dibangun oleh pemerintah kerajaan dan masyarakat Wajo. Untuk mengkoordinir jalannya madrasah dipercayakan kepada AGH Abdul Rahman Ambo Dalle (selanjutnya ditulis Ambo Dalle) yang merupakan salah seorang santri senior yang juga asisten M As'ad.

Perkembangan madrasah semakin meningkat dan semakin banyak santri yang belajar. Untuk menjaga kualitas santri dan kemudahan pengelolaan madrasah, M As'ad mengambil kebijakan tidak membuka cabang di daerah lain. Hal ini dilakukan M. As'ad bukan berarti beliau tidak peduli dengan pengembangan dakwah Islam di daerah lain, melainkan semata-mata untuk meningkatkan dan menjaga kualitas santrinya. Hal ini terwujud dengan lahirnya sejumlah ulama

besar di Sulawesi Selatan antara lain Ambo Dalle, AGHM Daud Ismail, AGHM Abduh Pabbajah, AGHM Yunus Maratan, dan lain-lain.

Pada usia 45 tahun M As'ad wafat, tepatnya pada 29 Desember 1952. Untuk mengenang dan mengabadikan namanya, warga Sengkang mengadakan musyawarah pada 9 Mei 1953 dan menyepakati perubahan nama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) menjadi Madrasah As'adiyah (MA) diambil dari nama M. As'ad ditambah dengan *iyah (ya' al-nisbah)* sehingga menjadi *As'adiyah*. Sepeeninggal M. As'ad, MAI Sengkang dipimpin AGHM Daud Ismail yang juga salah seorang muridnya. Dengan demikian MAI Sengkang berubah menjadi MA Sengkang. Perkembangan Madrasah As'adiyah dirasakan semakin signifikan seiring dengan dibolehkannya dibuka cabang-cabang di luar daerah.⁵

Mangkoso (sekarang masuk wilayah Kabupaten Barru) adalah salah satu daerah yang ingin mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di daerahnya pada 1932 setelah H. M. Yusuf Andi Dagong menjadi arung (raja) di kerajaan swapraja Soppeng Riaja menggantikan kakaknya H. Andi Maddiawe Petta Lawallu⁶ yang mengundurkan diri karena sudah sakit-sakitan. H. M. Yusuf Andi Dagong pantas menjadi raja, karena sebelumnya menjadi petta pabbicara⁷ di kerajaan Barru. Setelah menjadi arung, beliau dipanggil dengan gelaran Petta⁸ Soppeng. Pada 1953, di awal pemerintahannya

dibangunlah 3 buah mesjid masing-masing di Lapasu, Mangkoso, dan Takalassi. Namun, kondisi mesjid-mesjid yang dibangun di wilayah kerajaannya ternyata jamaahnya kecil, baik untuk shalat lima waktu maupun shalat Jum'at. Situasi ini membuat Petta Soppeng resah. Apa yang harus dilakukan, tiga mesjid sudah dibangun, tetapi gairah, minat, dan kesadaran masyarakat untuk menjalankan ibadah ternyata jauh dari yang diharapkan. Untuk membicarakan keresahannya, beliau mengundang seluruh tokoh agama dan masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya. Mereka berkumpul dalam acara *tudang sipulung*⁹ yang dilaksanakan di kediamannya (*saoraja*: rumah besar, rumah kediaman raja) sendiri pada Desember 1938.¹⁰ Hadir dalam pertemuan itu antara lain Petta Coa, Petta Lawallu, Puang Mangung, Petta Sullewatang (A. Sanang), Petta Pabbicara (A. Rengeng) Puang Huseng, Haji Kittab selaku kadi Soppeng Riaja, serta seluruh imam dan kepala kampung serta Petta Soppeng sendiri sebagai inisiator. Pertemuan itu membicarakan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menyemarakkan mesjid khususnya mesjid-mesjid yang ada di Mangkoso sebagai ibukota kerajaan agar dapat semarak sesuai harapan Petta Soppeng. Muncul berbagai macam usulan, salah satunya oleh Syekh Mahdar, ulama keturunan Arab dari Gorontalo yang beristri orang dari Mangkoso. Ia mengatakan bahwa untuk membangun jamaah mesjid maka pemahaman aga-

ma masyarakat harus ditingkatkan dengan cara mendirikan lembaga pendidikan. Usulan inilah yang diterima dan disepakati peserta pertemuan. Namun, masalah selanjutnya adalah dari mana mendatangkan guru yang memiliki kemampuan untuk memimpin perguruan, sebab di Mangkoso belum ada yang dianggap mampu untuk mengemban tugas itu. Ada usulan agar mendatangkan ulama dari pulau Jawa yang terkenal sebagai lumbung pesantren, ada pula yang mengusulkan dan menginginkan untuk meminta ulama di pulau Salemo, sebuah pulau di daerah Pangkep yang ketika itu terkenal banyak menghasilkan ulama-ulama besar.¹¹ Namun usulan yang terkuat adalah yang menginginkan agar meminta ulama kepada M. As'ad yang telah mendirikan MAI di Sengkang. Pada saat itu, MAI sudah terkenal dengan sistem pendidikannya yang memadukan antara sistem pendidikan *salafiyah* (tradisional) dengan modern (klasikal, memakai kelas, bangku, meja, papan tulis, dan jadwal reguler).

Dalam pertemuan juga diputuskan bahwa guru yang akan diminta adalah Ambo Dalle, yang ketika itu sudah menjadi asisten M. As'ad dalam mengelola MAI Sengkang. Ada beberapa alasan yang membuat pilihan jatuh kepada Ambo Dalle, karena mertuanya (Puang Baco) dari istri ketiganya tinggal di Pancana Tanete Rilau (Sekitar 40 km sebelah selatan Mangkoso). Lagi pula, Ambo Dalle sering bertandang ke Mangkoso karena beliau masih ada hubu-

ngan famili dengan Petta Coa. Selain itu, Puang Huseng (Ipar Petta Soppeng) pernah mengaji di Sengkang sehingga mengenal betul kualitas Ambo Dalle.

Atas dasar putusan itu, esoknya berangkatlah utusan dari kerajaan Soppeng Riaja dipimpin Haji Kittab (kadi Soppeng Riaja), Puang Huseng, dan Puang Baco menuju Sengkang untuk menemui M. As'ad. Di Sengkang, dikemukakanlah hasrat dan permintaan kerajaan Soppeng Riaja kepada M. As'ad. Namun, permohonan itu tidak dikabulkan. M. As'ad tidak mengizinkan adanya cabang MAI, dengan maksud untuk menjaga citra MAI Sengkang. Selain itu, guru yang diminta adalah Ambo Dalle, asisten beliau dalam mengelola MAI. Baginya, kepindahan Ambo Dalle dapat mempengaruhi perkembangan MAI. M. As'ad menginginkan agar orang-orang di Mangkoso yang ingin belajar cukup datang saja ke Sengkang dan tidak perlu membuka madrasah di Mangkoso. Dengan penolakan itu, pulanglah utusan Petta Soppeng Riaja ini dengan tangan hampa.

Tampaknya niat dan tekad Petta Soppeng Riaja untuk mendatangkan Ambo Dalle tidak subur. Untuk kedua kalinya disuruhnya utusan itu kembali ke Sengkang, kebetulan ada informasi bahwa saat itu Ambo Dalle sedang berada di Pancana mengajar di madrasah yang didirikan mertuanya. Maka diputuskanlah untuk menemui Ambo Dalle terlebih dahulu sebelum berangkat ke Sengkang. Berangkatlah Puang Huseng dan A.

Syamsuddin Daeng Muntu (sopir Petta Soppeng) sebagai utusan kerajaan Soppeng Riaja untuk menemui Ambo Dalle di Pancana. Dalam pertemuan itu, Ambo Dalle menyambut baik keinginan itu. Namun beliau belum bisa memberikan keputusan sebelum mendapat restu dari M. As'ad. Dengan sedikit harapan, pulanglah utusan itu ke Mangkoso. Selang beberapa hari, utusan itu kembali ke Sengkang untuk menemui M. As'ad. Rupanya di Sengkang telah hadir pula Ambo Dalle. Maka terjadilah pertemuan segi tiga, dalam kesempatan ini, utusan Mangkoso mengemukakan bahwa sangat sulit orang Mangkoso untuk datang belajar ke Sengkang sebagaimana keinginan M. As'ad, karena yang ingin belajar bukan hanya anak-anak tetapi juga orang tua mereka. Akhirnya dengan berat hati M. As'ad menyerahkan hal itu kepada Ambo Dalle dengan harapan agar Ambo Dalle menolaknya. Namun ternyata tugas itu diterima Ambo Dalle yang memang sudah ditemui terlebih dahulu di Pancana. Di samping itu, pertimbangan Ambo Dalle menerima permintaan Arung Soppeng Riaja dan masyarakat Mangkoso dan sekitarnya adalah semata-mata demi pertimbangan kepentingan umat Islam dan seluruh masyarakat. M. As'ad mengemukakan, ibarat pohon ia telah mencabut pohon bersama akarnya, maksudnya, bukan hanya diri Ambo Dalle yang berangkat ke Mangkoso tetapi turut pula keluarga dan beberapa santrinya. Petta Soppeng Riaja sangat gembira mendengar berita kese-

diaan Ambo Dalle untuk pindah ke Mangkoso. Ia menyiapkan segala sesuatunya untuk menjemput dan menyediakan fasilitas buat Ambo Dalle di Mangkoso. Maka ditetapkanlah hari keberangkatan Ambo Dalle ke Mangkoso. Ketika Ambo Dalle berangkat ke Mangkoso, M. As'ad bersumpah bahwa ia tidak akan menginjakkan kakinya di Mangkoso. Namun, hal itu tidak terjadi karena Mangkoso pasti dilewati jika hendak ke Makassar. Pada suatu hari, M. As'ad pergi dari Sengkang ke Makassar, mobil yang dikendarainya tiba-tiba mengalami kerusakan saat memasuki Mangkoso. Oleh masyarakat yang melihatnya, dan mengenali M. As'ad berada di dalam, maka beliau dibawa ke saoraja (rumah Petta Soppeng).¹²

Kedatangan Ambo Dalle di Mangkoso pada 21 Desember 1938 disambut hangat seluruh masyarakat dan santri yang sudah lama menunggu. Pada hari itu juga Ambo Dalle memulai pengajian perdananya dengan menempati mesjid Mangkoso sebagai tempat pengajian. Pengajian perdana itu diberi nama sama dengan pesantren M. As'ad di Sengkang yaitu Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI). Namun, MAI Mangkoso bukan cabang MAI Sengkang dan tidak mempunyai hubungan struktural maupun organisasi. Pengajian perdana ini berlangsung dengan sistem *halaqah* (*mangngaji tudang*, mengaji dalam keadaan duduk bersila di lantai) selama 20 hari. Pada perkembangan selanjutnya, Ambo Dalle sudah melihat bahwa situasi dan kondisi peng-

ruannya memungkinkan untuk mengadakan sistem klasikal. Hal ini disebabkan santri (*ana' pang-ngaji*) sudah banyak dan mempunyai latar belakang pendidikan dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Beberapa santri sudah lancar membaca kitab karena pernah belajar di Salemo, Sengkang, dan Campalagian. Sementara yang lainnya masih tersendat-sendat bacaan kitabnya bahkan ada yang belum dapat membaca Al-Qur'an. Hal ini dianggap perlu untuk membagi mereka ke dalam sistem kelas/tingkatan dan disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pemahamannya dalam membaca kitab-kitab pelajaran. Tingkatan ini berdasarkan pada tes/seleksi (*placement test*) yang dilakukan Ambo Dalle sendiri pada 11 Januari 1939. Dari hasil evaluasi tersebut dibukalah tingkat Tahdiriyah (3 tahun), Ibtidaiyah (3 tahun), I'dadiyah (1 tahun), dan Tsanawiyah (3 tahun). Sementara untuk belajar baca tulis Al-Qur'an dibuka tingkat Awaliyah. Ambo Dalle dalam mengajar santrinya tersebut dibantu 11 santri senior yang sudah duduk di tingkat Tsanawiyah, dari ke-11 santri itu ada yang datang dari Sengkang, Salemo, dan Campalagian.¹³

Materi yang diajarkan adalah bahasa Arab dengan "alat-alatnya" seperti *Nahwu* dan *Sharaf* yang merupakan kunci untuk memasuki inti pelajaran agama seperti Al-Qur'an, Tajwid, Tafsir, Ulumul Hadis, Usul Fiqh, Ilmu Tarbiyah, dan Ilmu Dakwah. Sementara Ilmu Akhlak, selain diajarkan di kelas (bagian

dari kurikulum), juga dimasukkan dalam peraturan pesantren, baik secara tertulis maupun perilaku sopan santun, serta perintah dan larangan dari para guru, khususnya Ambo Dalle. Selain pengajian pesantren yang dilakukan setiap usai shalat subuh dan maghrib, juga dilakukan latihan *tablig* (dakwah) setiap hari Kamis. Dalam mengawasi jalannya perguruan diangkatlah AGM Amberi Said (selanjutnya ditulis Amberi Said) sebagai pengawas umum (*al-Maraqib al-Am*). Untuk mempraktikkan kemampuan berdakwah, setiap hari Jum'at para santri ditugaskan berdakwah ke mesjid-mesjid sampai ke pelosok pegunungan dengan tidak meminta biaya dari tempat yang mereka kunjungi. Ambo Dalle, selain membina madrasah juga membina Jamiatul Huffadz (lembaga penghafal Al-Qur'an) yang ditangani langsung pembina-pembina khusus seperti AGHM Akib Siangka dan AGH Harun al-Rasyid. Secara umum, setiap santri diharuskan untuk dapat menghafal Al-Qur'an sekurang-kurangnya satu juz setiap tahunnya dan di antara *huffadz* (penghafal Al-Qur'an) yang dihasilkan adalah Abdullah Gilling Wiring Tasi, Abu Khaer Pangkep, Ahmad Jagong Pangkep, H. M. As'ad Bone, Hasan Ganra Soppeng, Abdul Rauf Bontobonto, M. Haedar Pangkep, Abdul Majid Mangkoso, dan Lambu Camba Maros. Banyak di antara mereka yang dapat menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dalam waktu yang cukup relatif singkat, di antaranya Al-Ahdaly yang dalam waktu 30 hari dapat meng-

hafal Al-Qur'an 30 juz, dan H. Zainuddin dalam waktu 40 hari.

Perkembangan selanjutnya dari ketiga tingkatan yaitu Tahdiriyah, Ibtidaiyah, dan Tsanawiyah, selama tiga tahun berjalan mulai berhasil menamatkan santrinya. Melihat perkembangan yang pesat itu, maka berdatanganlah permintaan dari daerah-daerah lain untuk dibuka cabang-cabang baru di luar Mangkoso. Mereka juga meminta tenaga guru, mubalig, dan para *huffadz* untuk imam shalat tarawih pada bulan Ramadhan dari seluruh Nusantara. Ambo Dalle dengan hati yang tulus menerima semua permintaan itu asalkan permohonan itu berasal dari masyarakat, pegawai syara dan unsur pemerintah setempat. Maka dalam waktu singkat dibukalah MAI di Bontobonto Pangkep, Paria Wajo, Kulo Sidrap dan Pattojo Soppeng. Kemudian menyusul daerah-daerah lain di antaranya Jagong Pangkep, Parepare, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Sistem pembelajarannya dilakukan dengan mengirim guru dan santri yang duduk di tingkat akhir secara bergantian berkunjung ke daerah-daerah tersebut. Santri-santri yang berasal dari tempat lain di Nusantara dan sudah menyelesaikan studinya, dapat juga membuka cabang-cabang di daerah asalnya. Inilah yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi Tengah, Utara, dan Tenggara.

Untuk mengatur kinerja pertukaran para santri dan guru yang ditugaskan di daerah dan MAI pusat, maka di setiap akhir tahun ajaran (bulan Sya'ban) di-

lakukan pertemuan dengan semua guru yang dipimpin Ambo Dalle bertepatan dengan acara penamatan (penyerahan ijazah) kepada santri yang lulus dan dihadiri seluruh lapisan masyarakat dan orang tua wali santri. Untuk membuktikan kemampuan para santri yang lulus, dalam acara penamatan juga diundang para ulama besar dari berbagai daerah untuk menguji kualitas para santri tingkat Tsanawiyah. Sementara para santri diberi kesempatan untuk memberikan ceramah dengan memilih berbagai macam topik.

Para santri Tsanawiyah yang lulus dan masih ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka dibuka tingkat Aliyah pada 1942 bersamaan dengan pembukaan tingkat untuk wanita yang diasuh oleh AGH Hafsah yang didatangkan dari Rappang. Proses pembelajaran untuk wanita dilaksanakan di rumah wakaf yang terletak di samping rumah yang pernah ditinggali Ambo Dalle (depan gedung induk sekarang) sementara untuk pengajian dilaksanakan di bawah kolong rumah Ambo Dalle. Jumlah santriwati yang aktif mengikuti pengajian berjumlah 10 orang, salah satu di antaranya adalah Hj. St. Haniah.¹⁴

Proses pembelajaran tidak seefektif seperti yang diharapkan, di mana sempat terganggu dengan datangnya para tentara Jepang yang mendarat di Sulawesi pada 9 Februari 1942 yang sebelumnya mengalahkan tentara kolonial Belanda. Kemandekan pembelajaran karena pemerintahan Jepang turut mengawasi

dengan ketat aktivitas sekolah dan melarang setiap orang untuk berkumpul. Larangan berkumpul itu karena tentara Jepang khawatir akan terjadi serangan balasan dari tentara sekutu. Namun, hal itu tidak membuat Ambo Dalle menyerah. Bahkan, beliau berinisiatif agar pembelajaran dilakukan di rumah setiap guru dan mesjid dengan duduk bersila. Strategi yang dilakukan Ambo Dalle adalah semua kaca dan daun pintu dicat dengan warna hitam agar cahaya lampu tidak bersinar dan tembus keluar. Sistem pembelajarannya dilakukan dengan cara membagi kelas secara berkelompok dengan mengambil tempat di mana saja yang dirasa aman asalkan menampung semua kelompok. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kevakuman dalam proses belajar. Suasana kurang kondusif bukan menjadi halangan untuk tidak melakukan proses pembelajaran, hal ini terbukti dengan berhasilnya membuka satu tingkat lagi yaitu Aliyah pada 1944. Untuk meningkatkan proses belajar mengajar di lingkungan MAI, Ambo Dalle meminta Amberi Said untuk tinggal bersamanya dalam membantu melaksanakan proses belajar mengajar.

Pesatnya perkembangan MAI Mangkoso ditandai dengan semakin banyaknya santri dan cabang yang semakin tersebar bukan hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di daerah lain di antaranya Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatra, dan Nusa Tenggara. Dengan demikian maka sudah waktunya

untuk dibentuk organisasi yang akan mengurus, mengkoordinir, dan mengorganisir hubungan-hubungan antar cabang MAI di berbagai daerah dengan MAI pusat di Mangkoso. Karena itulah timbul ide untuk mengadakan musyawarah pendidikan yang khusus membicarakan perencanaan pembentukan organisasi dimaksud.

Situasi dan kondisi saat itu, di mana penguasa Jepang, yang selalu menaruh curiga dalam segala bentuk aktivitas masyarakat, membuat para pencetus ide untuk membentuk kepanitiaan persiapan musyawarah nasional dengan cara menggabungkan dengan kepanitiaan akbar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad saw dan pertemuan rutin tahunan para guru-guru MAI serta dihadiri para pemuka agama/alim ulama (kadi) di Sulawesi Selatan, baik yang dari pusat maupun cabang. Adapun tempat atau kota yang dijadikan sebagai pusat pelaksanaan kegiatan adalah Watang Soppeng dikarenakan acara tersebut diprakarsai AGH Daud Ismail pengasuh Madrasah Al-Hidayah. Hal lain yang menjadi bahan pertimbangan adalah Watang Soppeng dinilai strategis karena letaknya di tengah dan mudah dijangkau. Acara itu didukung Ambo Dalle, Syekh H. Abdul Rahman Firdaus dari Pare-pare, AGH M. Abduh Pabbajah dari Alakkuang, Sidrap. Setelah peringatan Maulid Akbar, maka dilangsungkanlah pertemuan pada 5 Pebruari 1947 bertempat di Watang Soppeng yang dihadiri para ulama dan kadi dari berbagai daerah.¹⁵

Dari beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam pertemuan di hari itu disepakati, bahwa perlu dibentuk organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan usaha-usaha sosial yang dimaksudkan untuk dapat membina kaum Muslimin yang bertanggung jawab atas terselenggaranya ajaran Islam secara menyeluruh, serta menjamin kelestarian jiwa patriotisme di kalangan rakyat Sulawesi Selatan yang sedang menghadapi penindasan kaum penjajah. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mengurus dan mewadahi seluruh kegiatan MAI yang semakin majemuk dan berkembang. Dinamika yang timbul dalam pertemuan tersebut adalah masalah nama organisasi yang akan dibentuk, sehingga timbul berbagai usulan nama antara lain dari AGH Abduh Pabbajah dengan Nashrul Haq, dari AGH M Thahir Usman dengan Al-Urwatul Wutsqa, dari Syekh H. Abdul Rahman Firdaus dengan Darud Da'wah wal' Irsyad. Usulan terakhir inilah yang kemudian disepakati peserta pertemuan dan menjadi nama pendidikan warga Sulawesi Selatan di manapun mereka berada. Adapun pengertiannya adalah *Darun* (rumah, tempat, wadah), *Da'wah* (panggilan, ajakan, seruan untuk memasuki tempat tersebut), dan *Irsyad* (petunjuk). Dengan demikian Darud Da'wah wal' Irsyad (DDI) pada hakikatnya adalah organisasi yang mengambil peranan untuk mengajak manusia ke jalan yang benar dan membimbingnya menurut ajaran Islam menuju kebaikan

dan keselamatan di dunia dan akhirat.¹⁶

Untuk mewujudkan organisasi yang dapat segera melakukan kegiatan-kegiatannya, musyawarah alim ulama mengamanatkan kepada Ambo Dalle selaku pimpinan MAI yang memiliki cabang di beberapa daerah untuk mengambil prakarsa seperlunya. Untuk itu Ambo Dalle mengadakan musyawarah dengan guru-guru MAI beserta utusan cabang-cabang MAI dari daerah-daerah pada bulan Sya'ban 1366 H (1947 M) di Mangkoso untuk membicarakan pengintegrasian MAI Mangkoso menjadi DDI dan menetapkan Mangkoso sebagai pusat organisasi DDI. Pertimbangannya, Ambo Dalle sebagai ketua DDI berkedudukan di Mangkoso dan sudah memiliki hubungan komunikasi dengan cabang-cabang di daerah, sehingga memudahkan sosialisasi penggunaan nama DDI sebagai pengganti MAI. Pada tahun itu juga sudah ada tamatan Aliyah DDI yang melanjutkan studinya ke luar negeri, seperti Mesir, yaitu AGH Abdul Kadir Khalid, MA.

Pertemuan tahunan MAI tetap dilaksanakan. Setelah berintegrasi menjadi DDI pertemuan tahunan dinamai Mukhtamar. Mukhtamar Nasional I (masa transisi MAI ke DDI) dilaksanakan di pasar Mangkoso pada 1948. Mukhtamar ini mengesahkan susunan pengurus DDI hasil pertemuan di Watang Soppeng pada 1947.¹⁷ Secara historis-sosiologis, MAI Mangkoso yang lahir pada 11 Januari 1939, merupakan elemen dasar bagi lahirnya

wadah yang ditopang idealisme yang dalam perkembangannya berubah menjadi organisasi DDI. Atas dasar kerangka pemikiran ini, jelas pula posisi musyawarah alim ulama Ahl al-Sunnah wal' Jamaah yang diselenggarakan pada 17 Februari 1947 di Wawang Soppeng yang sebenarnya merupakan forum yang berusaha untuk merumuskan, membina, dan meningkatkan peranan DDI Mangkoso guna memenuhi hasrat dan kebutuhan masyarakat, yang membawa konsekuensi logis diintegrasikannya MAI Mangkoso menjadi DDI. Pengintegrasian itu harus diartikan sebagai tolok ukur dalam peningkatan bentuk struktural dan operasional dari wadah yang semula bersifat organisasi sekolah menjadi organisasi yang bersifat kemasyarakatan yang lapangan geraknya mengambil peranan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan usaha-usaha sosial.

DDI yang berkantor pusat di Mangkoso semakin berkembang. Permohonan dan permintaan untuk mendirikan cabang-cabang baru di seantero Nusantara meningkat. Hal ini mengakibatkan pimpinan pusat DDI kewalahan melayani permintaan tenaga guru, maka tindakan bijak harus segera diambil Ambo Dalle. Berbekal pengalamannya memimpin MAI, maka melalui keputusan rapat disetujui agar santri-santri kelas tertinggi ditugaskan mengajar pada madrasah-madrasah DDI yang sudah tersebar di seluruh Nusantara. Mereka diwajibkan mengabdikan selaku pendidik dalam jangka waktu tertentu. Setelah selesai, mere-

ka dipanggil kembali untuk meneruskan pelajaran. Cara itu ternyata bermanfaat ganda. Problem permintaan tenaga pengajar dapat diatasi tanpa memerlukan biaya besar. Sedangkan bagi para santri, kegiatan tersebut bermanfaat sebagai wahana mempraktikkan ilmu yang didapatkannya di madrasah. Dengan demikian, bila mereka berada di tengah-tengah masyarakat sudah siap untuk mengabdikan dirinya.

Pada saat DDI mengalami perkembangan yang pesat datang permintaan dari Arung Mallusetasi (Petta Calo) melalui utusannya yang terdiri atas Petta Sulewang Mallusetasi (A. Cambolang), H. Hamid dan H. Lamma menemui Petta Soppeng dan Ambo Dalle. Mereka menawarkan kepada Ambo Dalle untuk menjadi kadi Mallusetasi di Pare-pare karena kadi sebelumnya, H. M. Asaf, telah diberhentikan oleh Arung Mallusetasi karena adanya perbedaan faham keagamaan. Oleh Petta Soppeng, permintaan itu dikabulkan dengan pertimbangan demi pemerataan pendidikan dan syiar Islam serta melihat kondisi pesantren Mangkoso sudah berjalan dengan baik.

Bagi Ambo Dalle, jabatan kadi Pare-pare dapat menjadi jalan untuk lebih mengembangkan organisasi yang dipimpinnya sehingga beliau pun menyambut baik tawaran tersebut. Meski beliau harus bolak balik Mangkoso-Pare-pare setiap hari Kamis hanya dengan bersepeda. Namun, demi kemajuan organisasi dan pengabdiannya kepada agama, negara, dan masyarakat, tugas

itu dijalaninya dengan setia dan penuh keikhlasan. Sedikit demi sedikit Ambo Dalle mulai menyerahkan sebagian tugasnya kepada salah seorang kader yang dilihatnya punya kemampuan untuk bisa menggantikannya kelak, yaitu Amberi Said yang banyak mendampingi beliau sejak dibukanya MAI Mangkoso.

Pare-pare sangat mendukung untuk kemajuan organisasi karena letaknya hanya sekitar 35 KM dari Mangkoso. Ia adalah kota niaga dan kota pelabuhan yang menghubungkan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ditambah dengan alat transportasi, komunikasi, dan sarana serta prasarana penunjang lainnya. Pada saat diangkat menjadi kadi, Ambo Dalle diberikan sebidang tanah beserta gedung oleh Petta Mallusetasi. Gedung itu semula digunakan sebagai MAI cabang Pare-pare. Maka pada 1 Muharram 1369 H (1949) diadakan Mukhtamar II DDI di Pare-pare yang dirangkaikan dengan pembukaan/peresmian penggunaan kantor pusat DDI yang berlokasi di sebelah selatan Masjid Raya yang sebelumnya digunakan sebagai gedung madrasah (sekarang gedung itu digunakan sebagai rumah bersalin dan apotik Adariyah DDI). Seorang dermawan di Pare-pare, H. Abdul Gani membuatkan rumah untuk Ambo Dalle di samping Masjid Labukkang sebagai tempat tinggal sementara. Sambil menunggu pembangunan rumah beliau selesai, Ambo Dalle tetap menetap di Mangkoso. Namun, demi lancarnya pesantren DDI pusat dan tidak mengganggu tugas barunya

sebagai kadi, maka pada 1 Oktober 1949 Ambo Dalle secara resmi menyerahkan kepemimpinan pesantren DDI pusat kepada Amberi Said. Pilihan tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya bahwa Amberi Said telah menjadi asisten Ambo Dalle sejak awal didirikannya MAI Mangkoso, baik sebagai tenaga pengajar, pengawas umum, maupun pengelola administrasi pesantren. Ambo Dalle secara pelan-pelan juga memberikan kepercayaan kepadanya sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan informal sejak diangkatnya Ambo Dalle sebagai kadi di Pare-pare. Setelah pembangunan rumah Ambo Dalle selesai, maka pada 1950 beliau secara resmi hijrah (pindah) ke Pare-pare, meninggalkan Mangkoso yang penuh sejarah dan kenangan. Sementara pesantren DDI Mangkoso tetap berjalan dengan baik di bawah nakhoda baru. Pengurus DDI Mangkoso diberi status sebagai cabang otonom. Pesantren DDI Mangkoso berkembang cukup baik. Pada 1957 dibangun kampus baru di daerah Ujung Lare Pare-pare. Kampus ini luasnya 3 hektar dan dilengkapi dengan perkantoran PB DDI di samping lokal-lokal belajar para santri.

DDI dan Unsur-Unsur Masyarakat Sipil

Perkembangan perguruan Islam di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran para unsur masyarakat sipil (*civil society*) (pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi internal dan eksternal,

serta pengusaha). Keterlibatan individu tertentu seperti M. As'ad dan Ambo Dalle merupakan tokoh kunci eksisnya perguruan Islam mulai dari Sengkang, Mangkoso, hingga daerah-daerah lainnya di Nusantara. Kemampuan pribadi mereka dalam mengatur strategi baik terhadap interaksi antar keduanya, maupun dengan tokoh masyarakat, pemerintah, dan pengusaha menjadikan proses eksistensi ini semakin signifikan.

Kontribusi penguasa, ketika MAI Mangkoso akan dibuka menunjukkan betapa tingginya perhatian Petta Soppeng Riaja dalam hal pendidikan keislaman. Terlepas dari aspek politik sosialisasi pihak raja demi eksistensi dirinya sebagai penguasa di wilayah Soppeng Riaja, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan inisiatif yang dilakoninya untuk pertama kali mendirikan tiga buah mesjid, lalu berusaha meramaikannya dengan cara musyawarah bersama beberapa tokoh masyarakat, kemudian hasil musyawarah tersebut dijadikan landasan untuk mengirimkan utusan ke lembaga penting pada waktu itu di Sengkang, melahirkan perguruan Islam yang bertahan hingga kini. Sekalipun mengalami kesulitan pada mulanya untuk meyakinkan M. As'ad untuk melepaskan staf dan asisten kepercayaannya untuk mendukung pendidikan MAI di Mangkoso, tetapi dengan kepiawaian Petta Soppeng menghadapi utusannya serta merancang pertemuan dan negosiasi dengan Ambo Dalle dan M. As'ad, akhirnya cita-cita

untuk mendirikan sekolah Islam di Mangkoso tercapai.

Tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam dialog dan musyawarah perencanaan perihal menyemarakkan kegiatan keislaman senantiasa giat dan direspons dengan cermat dan cerdas oleh pihak penguasa dan pengusaha. Penguasa memberikan ijin dan melaksanakan strategi yang diputuskan bersama dalam musyawarah, kemudian pengusaha ikut memberikan sumbangan dana dan materi berupa wakaf, infaq, dan sadaqah, sehingga akhirnya perguruan Islam ini berkembang hingga kini.

Penutup

Demikianlah model kerjasama *self help* atau resepsi aktif dalam pembangunan pendidikan keislaman yang banyak muncul di Nusantara, yang seharusnya tetap menjadi acuan dalam pengembangan, bukan hanya pendidikan keislaman, tetapi juga pendidikan umum dan kejuruan. Sehingga ketergantungan pada pihak donatur yang sering penuh dengan syarat-syarat tertentu demi interes pemberi dana tersebut dapat dihindari. Bila memang kemudian terjadi penerimaan bantuan lain, maka tentu berdasarkan tarik menarik kepentingan serta berdasarkan pada *win-win solution* di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan.

Catatan Akhir:

1. Anregurutta atau dalam bentuk singkatnya Gurutta adalah panggilan ulama besar di Sulawesi Selatan, yang sama artinya dengan Kyai di Jawa,

- Tengku di Aceh, Tuan Guru di Nusa Tenggara, Buya di Sumatera.
2. Lahir di Mekkah pada tahun 1907.
 3. Lihat, Abd. Muis Kabry, *Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DDI*, (Ponpes DDI Putri Ujung Lare Parepare) 1983, h. 4.
 4. *Ibid.*,
 5. Lihat, KH Daud Ismail, "Riwayat Hidup Alm. KH M. AS'ad; Pendiri Utama As'adiyah Sengkang, Cet. I. (Ujung Pandang, Bintang Selatan) 1989, h. 2, 11-16 dikutip dalam Ahmad Rasyid A. Said, *Sejarah Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru Sulawesi Selatan*, (Ponpes DDI Mangkoso Sulawesi Selatan) 2002, h. 8.
 6. Posisi Arung ini juga dia warisi dari ayahnya H. Andi Tobo Petta Coa.
 7. Hakim yang berwenang memutuskan perkara bersama unsur kerajaan yang lain.
 8. Gelaran bangsawan Bugis yang digunakan untuk panggilan kepada Raja,
 9. Bermusyawarah sambil duduk bersila.
 10. Ahmad Rasyid A. Said, *op. cit.*, h.10.

11. *Ibid*
12. *Ibid*
13. *Ibid*
14. Hj. St. Haniah adalah salah satu santri wanita pada tingkat Tahdiriyah dan Ibtidaiyah MAI Mangkoso Angkatan I. Lebih Lanjut Ahmad Rasyid A. Said, *op. cit.*, h.18.
15. *Ibid.*,
16. Abd. Muis Kabry, *op. cit.*, h. 10.
17. *Ibid*

Daftar Pustaka

Ismail, KH Daud (1989). *Riwayat Hidup Alm. KH M. AS'ad; Pendiri Utama As'adiyah Sengkang, Cet. I. Ujung Pandang: Bintang Selatan* 1989.

Kabry, Abd. Muis (1983). *Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DDI Pare-pare: Ponpes DDI Putri Ujung Lare*.

Said, Ahmad Rasyid A. (2002). *Sejarah Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru Sulawesi Selatan*, Mangkoso: Ponpes DDI Mangkoso Sulawesi Selatan.

Rasulullah saw. bersabda:

أَبْعَدُ الْأَشْيَاءِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي.

"Yang paling jauh kepada Allah Ta'ala adalah hati yang keras".

Sabdanya lagi:

مِنَ الشَّقَاءِ أَرْبَعٌ: قَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَجَمُودُ الْعَيْنِ، وَالْحِرْصُ، وَطُولُ الْأَمَلِ

"Empat perkara menjadi tanda kejahatan yaitu: hati yang keras, mata yang beku, senantiasa berandai-andai dan panjang harapan".

Berhati-hatilah anda dari empat sifat yang berbahaya itu!